

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS (PROLANIS) DI PUSKESMAS PANGARENGAN KABUPATEN SAMPANG MADURA**

**Lilik Maisaroh**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[Lilikmaisaroh17@gmail.com](mailto:Lilikmaisaroh17@gmail.com)

**Weni Rosdiana**

D3 Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[wenirosdiana@unesa.ac.id](mailto:wenirosdiana@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Prolanis adalah program yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama yaitu Puskesmas. Puskesmas Pangarengan diwajibkan untuk melaksanakan program dari BPJS Kesehatan. Program ini merupakan wujud dari kebutuhan masyarakat yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Prolanis di Puskesmas Pangarengan Kabupaten Sampang Madura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian menggunakan enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena kunjungan dari masyarakat Kecamatan Pangarengan yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus belum berpartisipasi dalam program ini. Karakteristik agen pelaksana sudah cocok untuk melaksanakan program. Sikap dan kecenderungan pelaksana sudah baik dan tidak ada penolakan terhadap program. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sumberdaya manusia untuk pelaksanaan sosialisasi masih mengalami kendala yaitu kurangnya pelaksana promkes dari program prolanis, sedangkan sumberdaya anggaran masih terbatas dan sumberdaya waktu yang sudah baik dan konsisten sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih menghambat program yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang menengah kebawah dan persepsi masyarakat mengenai kesadaran akan pentingnya menjaga dan mencegah timbulnya penyakit kronis masih kurang sedangkan lingkungan politik untuk agen pelaksana sangat mendukung sementara masyarakat masih antusias tinggi. Saran yang diajukan peneliti sebagai berikut Perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk promkes, Perlu adanya sosialisasi rutin setiap bulan untuk mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dari program, Mengelola antrian peserta dengan menambahkan jumlah pelaksana prolanis sehingga, peserta tidak perlu menunggu lama untuk mengikuti aktivitas dari kegiatan tersebut. Mengajukan peningkatan anggaran dana yang diberikan BPJS Kesehatan agar dapat mencukupi kebutuhan program prolanis.

Kata Kunci : Implementasi, Prolanis, Lansia

### **Abstract**

Prolanis is a program launched by BPJS Health that is implemented at the First Level Health Center, namely the Puskesmas. The Pangarengan Community Health Center is required to carry out programs from the Health BPJS. This program is a manifestation of the needs of people who suffer from hypertension and diabetes mellitus. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Prolanis in the Pangarengan Health Center, Sampang Madura Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data were collected using interview, observation and documentation techniques. The focus of the study uses six indicators namely Size and Policy Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agencies, Inter-Organizational Communication and Activities of Implementing Agencies and the Economic, Social and Political Environment. The results showed that the size and objectives of the policy had not been maximally reached because visits from Pangarengan Subdistrict people suffering from hypertension and diabetes mellitus had not participated in this program. The characteristics of the

implementing agency are suitable for implementing the program. The attitude and inclination of the executor is good and there is no rejection of the program. Communication between organizations and implementing activities has been going well and smoothly. Human resources for the implementation of socialization are still experiencing problems, namely the lack of health promotion implementers from the prolanis program, while the budget resources are still limited and the time resources are good and consistent with the needs of the community. The economic, social and political environment is still hampering the program, which is the economic condition of the middle class people and the community's perception of the importance of maintaining and preventing the emergence of chronic diseases is still lacking while the political environment for implementing agents is very supportive while the community is still highly enthusiastic. Suggestions proposed by researchers as follows There is a need for additional human resources for health promotion, There is a need for regular socialization every month to invite the community to participate and receive benefits from the program, Manage the queue of participants by adding the number of prolanis implementers so that participants do not have to wait long to follow activities of these activities. Propose an increase in the budget of funds provided by BPJS Health to meet the needs of the prolanis program

Keywords: Implementation, Prolanis, Elderly

## PENDAHULUAN

Kesehatan ialah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena hanya dengan kondisi jasmani yang sehat manusia dapat melakukan segala aktivitasnya secara normal. Dari hal tersebut negara memberikan perhatian kepada masyarakat dibidang kesehatan. Upaya membentuk layanan di bidang kesehatan diatur melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 1 sebagai berikut :

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan.
3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/ atau anggota keluarganya.
4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta jaminan sosial.
5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

Jaminan hari tua merupakan salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan tunjangan uang tunai yang dapat diberikan kepada peserta tunjangan pembayaran tunjangan, tanggung jawab tetap atau penerimaan dunia di Indonesia. Implementasi Kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasioanal didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia

tentang Badan Kesehatan yang lebih banyak manfaatnya yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014 yang terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang dijamin meliputi;

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialis
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan kerap sekali dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi pasien. Seperti terjadinya beberapa resiko gangguan penyakit dan menurunnya kekebalan tubuh. Hal tersebut dapat sampai menimbulkan berbagai penyakit kronis yang terbilang lebih kompleks, dan menyebabkan adanya penurunan kondisi kesehatan seseorang secara bertahap. Penyakit tersebut seperti diabetes melitus, gangguan fungsi ginjal, hati dan gangguan fungsi organ tubuh lainnya serta dapat menyebabkan terjadinya penyakit Hipertensi. Selain penyakit kronis, penyakit akut juga menimbulkan keluhan secara mendadak. Biasanya, penyakit yang diderita tidaklah lama, cepat mengalami perkembangan, dan membutuhkan perawatan yang mendesak. Oleh karena itu masyarakat yang terdaftar BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan dalam penanganan yang preventif untuk mencegah dan mengobati penyakit yang diderita. Hal tersebut termasuk salah satu tujuan dari adanya program BPJS Kesehatan guna mencegah timbulnya perubahan yang tidak diinginkan dari penyakit kronis sendiri yaitu penyakit komplikasi yang mana penyakit dapat menjadi memburuk atau menunjukkan jumlah gejala yang lebih besar atau perubahan patologi, yang menyebar ke seluruh

tubuh atau berdampak pada sistem organ yang lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program kesehatan, salah satunya adalah Program Prolanis yang dilaksanakan di Faskes Puskesmas. Program Prolanis tersebut adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan upaya biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Sasaran dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis (Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi). Program Prolanis dilaksanakan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Bentuk aktifitas pelaksanaan Prolanis meliputi : (1) Aktifitas konsultasi medis/edukasi, (2) Home Visit (kunjungan), (3) Reminder (peringatan), (4) Aktifitas klub dan (5) Pemantauan status kesehatan. Pelaksanaan prolanis dilakukan di puskesmas dengan ketentuan waktu yang telah disepakati oleh pelaksana dan sasaran dari program prolanis. Adapun tujuan dari program prolanis yaitu untuk mendorong penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes (Fasilitas Kesehatan) tingkat pertama memiliki hasil “baik” pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit Diabetes Melitus Tipe II dan Hipertensi sesuai Panduan Klinis terkait, sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit komplikasi.

Fasilitas Kesehatan adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang melaksanakan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah Puskesmas, organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok untuk pelayanan BPJS Kesehatan yang dilakukan selama 1 (satu) bulan sekali. Puskesmas memiliki posisi sentral di masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan kabupaten/kota, menurut Departemen Kesehatan RI dalam Peraturan Nomor : 585/MENKES/SK/V/2007 menjadi Menkes Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, ialah Puskesmas. Dimana puskesmas sebagai fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Pelayanan kesehatan di Puskesmas ditunjukan kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak dari pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. Puskesmas tetap konsisten memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, walaupun sempat berada pada era yang berbeda (Era Askes dan Era BPJS) dan ditambah dengan keberadaan Puskesmas yang mudah untuk dijangkau. Program Prolanis sendiri menangani pasien penderita penyakit kronis yakni Diabetes mellitus tipe II dan Hipertensi. Diabetes melitus tipe II yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah (glukosa). Pada diabetes mellitus tipe II ini tubuh tidak memproduksi cukup insulin, atau menolak insulin, gejala berupa rasa haus meningkat, sering buang air kecil, lapar, lelah, dan penglihatan kabur dan pada beberapa kasus tidak ada gejala. Penanganan berupa diet, olahraga, obat dan terapi insulin. Untuk penyakit Hipertensi sendiri yaitu peningkatan tekanan darah (TD) secara menetap kurang lebih 140/90 mm- HG. Hipertensi yang tidak terkontrol atau tidak diobati dapat menimbulkan komplikasi dan kematian premature. Komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi, seperti stroke, penyakit jantung koroner, ginjal kronis, gagal ginjal, kerusakan retina, hingga kebutaan dan penyakit pembuluh darah perifer, termasuk impotensi. “Untuk menghindari kedua penyakit tersebut BPJS Kesehatan terpanggil untuk menjaga kualitas kesehatan hidup para peserta untuk mendapatkan manfaat dari Program Prolanis BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan di setiap Fasilitas Kesehatan seperti di Rumah Sakit

dan Puskesmas.(Sumber: <http://kompasiana.com>)

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan enam indikator yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi Mempersiapkan dan memilih data untuk dianalisis, beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam pengelolaan data, mengeksploitasi dan pengkodean data, menganalisis lebih detail dengan mengkodekan data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam bentuk narasi, Memvalidasi data-data untuk keakuratan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat dilakukan analisis implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) terdapat 6 indikator yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Berikut uraian hasil penelitian ini :

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Suatu kebijakan harus memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan terstruktur maka tidak akan menimbulkan perbedaan persepsi antara para pelaksana kebijakan dan peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan.

Implementasi program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang dilaksanakan di Puskesmas Pangarengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lansia yang menyandang penyakit Hipertensi dan Diabetes Mellitus Tipe 2. sedangkan ukuran keberhasilan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah meningkatkan jumlah kunjungan peserta lansia yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan bahwa tujuan serta ukuran keberhasilan dari program tersebut telah disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana dan Promkes Prolanis di Puskesmas Pangarengan kepada masyarakat, namun sosialisasi yang dilakukan oleh Promkes dari Program Prolanis belum disampaikan secara merata di daerah Kecamatan Pangarengan sehingga hal ini mampu menghambat tercapainya keberhasilan dari tujuan kebijakan.

Tujuan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) tertulis dalam buku panduan Prolanis dari BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama yaitu Puskesmas, sehingga pelaksana mengerti tujuan adanya Program Prolanis untuk dilaksanakan. Menurut Ketua Pelaksana Program Prolanis setelah satu tahun Program Prolanis ini wajib diimplementasikan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan sudah meningkat angka kunjungan peserta dibandingkan sebelumnya. Pada awal tahun 2017 pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) hanya diikuti oleh 5-15 peserta saja, pada tahun 2018 meningkat menjadi 26 peserta, namun kunjungan dari peserta lansia yang ada di Kecamatan Pangarengan ini menurut ketua pelaksana masih sangat kurang karena jika dilihat dari hasil rekam medik yang peserta BPJS Kesehatan yang melakukan kunjungan ke Puskesmas Pangarengan di dominasi oleh lansia yang menderita penyakit Hipertensi dan Diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan ukuran keberhasilan program belum tercapai secara maksimal.

### **2. Sumberdaya**

Dalam suatu implementasi kebijakan, sumberdaya yang paling penting adalah sumberdaya manusia. Dibutuhkan sumberdaya yang kompeten dalam suatu kebijakan sehingga tujuan dari program bisa tercapai. Kepala Puskesmas Pangarengan selaku penanggungjawab program menyebutkan bahwa pelaksana dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan adalah Dokter, Perawat, Ahli Gizi dan dibantu para petugas lainnya. Dilihat dari jumlah pelaksana Prolanis sebanyak 9 pelaksana sudah cukup untuk mengimplementasikan program Prolanis setiap bulannya.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) menurut masyarakat sudah ahli dalam bidangnya. Dokter, Ahli Gizi serta pelaksana yang lain sangat berkompeten dalam bidang kesehatan. Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan selalu mengingatkan peserta untuk menjaga kesehatannya serta selalu menghadiri Prolanis untuk memantau kesehatannya. Ketua pelaksana selaku perawat dari Program Prolanis juga selalu memberikan pelayanan yang maksimal dalam pemeriksaan kesehatan dan informasi terkait aktivitas-aktivitas Prolanis untuk peserta.

Implementasi kebijakan juga membutuhkan sumberdaya dana atau finansial. Menurut Ketua Pelaksana, sumber daya dana atau anggaran berasal dari anggaran BPJS Kesehatan yang dianggarkan untuk Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) sebesar 450 setiap pelaksanaan Prolanis. Sumberdaya dana yang ada digunakan untuk biaya konsumsi dan biaya operasional. Jumlah anggaran dana yang digunakan sangatlah terbatas karena sumber daya dana dari BPJS Kesehatan diberikan setiap bulan, sehingga pihak Puskesmas dan pelaksana sendiri selalu memberikan anggaran dana untuk biaya tambahan dari kegiatan Prolanis. Akibat dari biaya yang terbatas, membuat pelaksana terkadang tidak memberikan konsumsi sesuai dengan permintaan peserta untuk dibedakan antara konsumsi peserta yang menyandang penyakit Hipertensi dan Diabetes, terkadang pelaksana juga harus menjadi instruktur senam dari kegiatan Prolanis karena keterbatasan dana untuk membayar instruktur senam dari luar.

Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang ada harus didukung dengan sumberdaya waktu agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai. Menurut Ketua Pelaksana sumber daya waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Prolanis sudah cukup baik dan konsisten yaitu sesuai dengan kesepakatan pelaksana dan peserta, tepatnya pada hari jum'at di minggu ketiga setiap bulan.

### **3. Karakteristik Agen Pelaksana**

Agen pelaksana pada implementasi kebijakan meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Implementasi kebijakan publik akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan agen pelaksana. Dalam Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) diperlukan agen

pelaksana yang cocok, sehingga dapat menunjang keberhasilan program.

Dari hasil penelitian, menurut Ketua Pelaksana Prolanis, Penanggungjawab dari pihak Puskesmas Pangarengan merupakan agen pelaksana yang mendukung berjalannya program dengan memberikan dana yang berasal dari BPJS Kesehatan. Penanggungjawab dari pihak Puskesmas yang mendukung berjalannya program dengan memberikan informasi kepada pelaksana Prolanis jika ada pemberitahuan dari BPJS Kesehatan mengenai Prolanis. Karakteristik pelaksana yang cocok untuk mengimplementasikan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah orang-orang yang berkompeten tentang dunia kesehatan seperti Dokter yang paham mengenai penyakit-penyakit pasien dan cara untuk mengobati pasien, sementara Perawat dan pelaksana yang lainnya membutuhkan pula seorang pelaksana yang komunikatif kepada masyarakat yaitu dengan mengadakan komunikasi seperti konsultasi langsung dengan masyarakat dilapangan dan pelaksana yang mengerti akan kondisi dilapangan sehingga membutuhkan pelaksana yang bersedia menjadi petugas yang ramah, tanggungjawab dan pro aktif kepada masyarakat, mengingat ini merupakan sebuah sosialisasi atau menerangkan kepada para peserta lansia mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mengembangkan kualitas kesehatan masyarakat yang menderita penyakit Hipertensi dan Diabetes guna mencegah timbulnya penyakit komplikasi terutama pada peserta BPJS Kesehatan. Dalam implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan, cakupan yang dijangkau yaitu hanya Kecamatan Pangarengan sehingga diperlukan agen pelaksana dari Puskesmas setempat

### **4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja suatu kebijakan publik. Respon pelaksana terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk dalam implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) merupakan button-up dari suatu kebutuhan masyarakat dalam menangani/mengobati penyakit yang dideritanya terutama untuk peserta BPJS

Kesehatan yang menyangkut penyakit kronis. Program Prolanis ini dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama yaitu Puskesmas dan dilaksanakan oleh petugas Puskesmas sendiri. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menyangkut penyakit kronis.

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2017, kemudian diwajibkan oleh pihak Puskesmas pada tahun 2018 yang disetujui oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Puskesmas sebagai penanggungjawab program, selalu menghimbau masyarakat untuk mengikuti program yang ada di Puskesmas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Puskesmas mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Respon positif juga berasal dari masyarakat yang menjadi peserta dari Prolanis. Respon tersebut ditunjukkan dengan kehadiran peserta Prolanis dalam pelaksanaan program karena mengetahui akan manfaat dari pelaksanaan program Prolanis. Para pelaksana juga mengetahui akan pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan pada saat lansia dengan memanfaatkan program yang sudah ada. Kepedulian tersebut kemudian diaplikasikan dengan kesediaan pelaksana dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta lansia agar merasakan pelayanan yang maksimal dari pelaksana.

Mengenai sosialisasi dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dilakukan pada saat pelaksanaan Prolanis dan acara di Polindes oleh para Promkes agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami tujuan dari adanya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). dilakukan evaluasi antar pelaksana pada akhir kegiatan dengan harapan implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan.

#### **5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka asumsi kesalahan akan kecil untuk terjadi. Dalam implementasi suatu kebijakan, komunikasi juga dibutuhkan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan dari kebijakan. Komunikasi baik dari pelaksana guna untuk mencapai tujuan dari kebijakan.

Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) melibatkan petugas Puskesmas, BPJS Kesehatan dan masyarakat, sehingga diperlukan komunikasi diantara para pelaksana tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Promkes Prolanis di polindes setiap Dusun yang telah dipilih oleh Puskesmas. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat yang mengikuti penyuluhan di pustu/polindes setempat, sosialisasi dilakukan langsung oleh pihak Promkes di setiap Dusun namun tidak semua Dusun telah menerima sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan karena sumberdaya manusia dari promkes sendiri masih kurang. Sehingga informasi mengenai program Prolanis belum merata di setiap Dusun Kecamatan Pangarengan.

Komunikasi yang dilakukan antar pelaksana sudah cukup baik. Komunikasi yang paling sering dilakukan adalah komunikasi antar pelaksana sendiri karena mereka yang mengetahui langsung keadaan pada saat pelaksanaan Prolanis. Komunikasi yang terjalin sudah mampu mendukung berjalannya Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk mencapai tujuan dari program yaitu meningkatkan kehadiran peserta dalam pelaksanaan Prolanis. Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan program Prolanis.

#### **6. Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik**

Kondisi ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi juga dapat mendukung atau menghambat keberhasilan sebuah program kebijakan. Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) juga dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Pangarengan yang menjadi sasaran pelaksanaan Program Prolanis di Puskesmas Pangarengan adalah menengah kebawah. Mayoritas dari masyarakat memiliki pekerjaan sebagai nelayan, petani, pedagang dan serabutan jadi lebih memilih bekerja daripada mengadiri program Prolanis, sehingga angka kunjungan peserta belum meningkat. Kondisi tersebut dapat menghambat untuk mencapai tujuan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). kondisi sosial berkaitan dengan persepsi masyarakat yang berpikir bahwa jika tidak sakit parah dan masih bisa diobati

dirumah dengan membeli obat di toko kenapa harus pergi ke puskesmas. Sebagian masyarakat kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya mengikuti program Prolanis. Berkaitan dengan kondisi politik, Ketua Pelaksana Prolanis menyatakan bahwa agen pelaksana dari program ini merespon baik dengan memberikan suntikan dana untuk program dan adanya dukungan dari Dinas Kesehatan dengan membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut mendorong dalam pencapaian tujuan program.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan dapat diketahui bahwa lingkungan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Sedangkan kondisi politik dapat mendorong pencapaian tujuan dari program Prolanis.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan Kabupaten Sampang Madura yang telah dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142) dengan enam indikator, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Agen Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pangarengan Kabupaten Sampang Madura telah berjalan dengan baik. Masyarakat yang mengikuti program Prolanis ini telah merasakan manfaatnya, kondisi kesehatan peserta dari program Prolanis sudah mencapai hasil yang baik dari sebelum peserta mengikuti program Prolanis. Puskesmas Pangarengan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sesuai tujuan dari BPJS Kesehatan yaitu mendorong peserta penyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75% peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes Tingkat Pertama memiliki hasil “baik” pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit Diabetes Mellitus Tipe 2 dan Hipertensi sesuai panduan klinis terkait sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi penyakit.

### **Saran**

Dari uraian diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk promkes agar sosialisasi dapat dilakukan secara merata setiap desa di Kecamatan Pangarengan.
2. Perlu adanya sosialisasi rutin setiap bulan untuk menerangkan dan mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dari program Prolanis dan mengadakan sosialisasi khusus terkait pentingnya mengikuti program yang ada di Puskesmas terutama untuk program Prolanis sendiri agar masyarakat mengerti tujuan dari program Prolanis.
3. Untuk mengurangi jumlah antrian peserta Prolanis yang terlalu panjang, maka perlu adanya penambahan jumlah pelaksana Prolanis, sehingga peserta tidak menunggu lama dalam kegiatan Prolanis.
4. Puskesmas Pangarengan sebaiknya mengajukan permintaan penambahan anggaran dana kepada BPJS Kesehatan agar dapat mencukupi kebutuhan program Prolanis.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Dr. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., MA. selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun sidang skripsi.
5. Dan pihak-pihak yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dunn, William N, 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Ombak (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press
- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Permenkes (2014) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12. Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;2014
- Undang-Undang No. 75 Tahun 2014. Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- BPJS Kesehatan. Buku Panduan Praktis Prolanis ; 2014. <http://bpjs-p.unduh/index/39> diakses pada tanggal 10 Maret 2019.
- Puji Wijayanti, Lina Miftahul Jannah. 2019. "Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia". Vol 4, (1): hal. 21. (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2548>, diunduh tanggal 01 April 2020.
- Wibisono Risky. 2017. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya". Vol 1 (2): hal. 56. (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2541>, diunduh tanggal 01 April 2020.
- Lestari Hermin Aprilia. 2017. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017". Vol 6 (5). (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/23237>, diunduh tanggal 01 April 2020
- Buku panduan seputar tentang BPJS
- Kementerian Kesehatan RI. Undang-Undang No. 40 tahun 2004. Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang No. 75 Tahun 2014. Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Fathoni, Zukrillah. 2017. Administrasi Kesehatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) BPJS Kesehatan di Puskesmas Kota Bandar Lampung. Skripsi.